



Maret 2013

Edisi 03/NL/03/2013

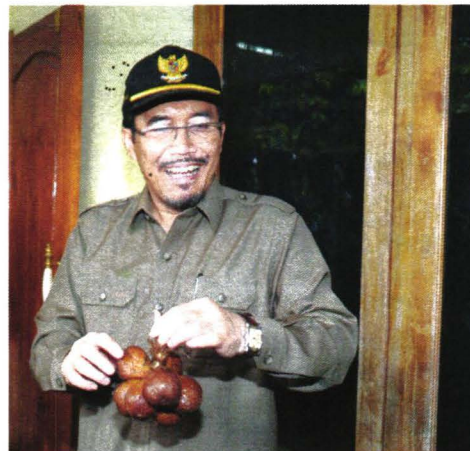
Daftar Isi:

	Hal
1. Perlunya Pembinaan Bagi Petani Untuk Kemudahan Mendapat Sertifikat Ekspor.....	1
2. Pemerintah Lakukan Langkah Persiapan dan Antisipasi Cuaca 2013.....	2
3. Indonesia Penghasil Kakao Terbesar Ke Tiga.....	3
4. Audit Importir Terdaftar Sebagai Langkah Investigasi Pemerintah.....	4
5. Kementan Serahkan Sertifikasi ISPO Kepada Perusahaan Perkebunan Yang Berhak.....	6
6. Kementan Tetap Pantau Isu Seputar Persapian.....	9
7. Bukti Keberhasilan Gerakan Tanam Dengan Jenis Padi Inpari 11 Di Cilacap.....	10

Perlunya Pembinaan Bagi Petani Untuk Kemudahan Mendapat Sertifikasi Ekspor

Meskipun, saat sekarang baru 60 persen tingkat produksi salak yang menjadi varietas unggulan Kabupaten Magelang, sejumlah kelompok tani di Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung telah mulai mengekspor varietas salak lumut ke China. Produksi salak lumut mulai dirasakan bangkit pasca erupsi Merapi tahun 2010 silam.

"Ini berkah dari erupsi Merapi. Di sini tumbuh subur tanaman, karena tidak semua wilayah tumbuh salak dengan baik," kata Menteri Pertanian, Suswono saat melakukan dialog dengan sejumlah Kelompok Tani Salak Lumut di Dusun Kemukus, Sudimoro, Srumbung. Pada kunjungan tersebut Mentan juga melihat proses pengepakan, pengemasan salak lumut CV Agro Nusa Srumbung yang akan diekspor (6/3).



Mentan mengaku cukup terkesan dengan wilayah Srumbung karena memiliki lahan yang subur dan sangat baik untuk ditanami pohon salak.

"Buah salak merupakan khas tanaman tropis, termasuk buah-buahan eksotik. Jadi jangan sampai ada potensi besar, tapi tidak dimanfaatkan," jelas Mentan.

Dengan perawatan salak secara kontinyu, akan meningkatkan harga salak menjadi baik. Kementan berjanji akan membantu petani salak di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan teknologi pertanian yang memadai. Hal tersebut mengingat wilayah tersebut memiliki potensi salak yang melimpah dan berkualitas.



“Kita akan bantu petani dalam bentuk teknologi pertanian yang memadai,” kata Mentan

Selain bantuan teknologi, Pemerintah juga akan memberikan pembinaan khusus kepada para petani salak di wilayah Srumbung agar produk salak yang sudah menembus ekspor memiliki kualitas yang terjaga. Kementan berusaha membina petani agar mampu memenuhi standar ekspor, karena beberapa negara sudah mulai menerima buah salak dari Indonesia.

Menurut Menteri Pertanian, produk salak lumut yang sudah menembus pasar China harus terus dijaga kualitasnya. Sebab, banyak negara tujuan ekspor yang memiliki standar tinggi, sehingga petani salak harus mau terus meningkatkan kualitas produknya. Hal ini seperti yang terjadi pada produk manggis asal Indonesia yang baru

mampu menembus pasar Australia setelah 6 tahun mengajukan ekspor.

Ada dua jenis pembinaan utama yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada para petani salak lumut di desa Srumbung yaitu pembinaan pasca panen dan pengemasan.

“Kita akan bina agar petani mampu memenuhi standar ekspor karena beberapa negara sudah mulai menerima buah salak dari Indonesia. Kita permudah dengan mengeluarkan sertifikasi, termasuk kita akan penuhi standardnya bagaimana, agar negara pengimpor tidak rugi,” kata Mentan.

Mentan juga meminta lembaga sertifikasi untuk tidak mempersulit petani buah maupun sayur-sayuran dalam memperoleh sertifikasi terhadap produk mereka sehingga memudahkan untuk melakukan ekspor.

“Saya meminta kepada lembaga sertifikasi untuk tidak mempersulit, juga tidak menerapkan tarif yang mahal untuk petani memperoleh sertifikat,” kata Mentan.

Selain meminta kepada lembaga sertifikasi, Mentan menyatakan, Kementan juga tidak akan memberikan kesulitan bagi petani buah, sayur maupun produk hortikultura lainnya untuk mendapatkan sertifikasi.

Pemerintah Lanjutkan Langkah Persiapan dan Antisipasi Cuaca 2013

Produksi gabah kering tahun 2013 diperkirakan mengalami kenaikan dan lebih baik dari tahun 2012. Dari data BPS produksi gabah kering tahun 2013 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 5 persen, sedangkan kegagalan tanam akibat banjir tahun 2012 dan gagal panen terbilang kecil hanya 1 persen secara nasional.

“Produksi gabah Nasional tahun ini diperkirakan naik tipis dibanding tahun 2012 lalu yang diperkirakan mencapai 69 juta ton. Tahun ini pemerintah memperkirakan produksi gabah Nasional akan mencapai 72 juta ton”, hal itu dikatakan Menteri Pertanian Suswono saat mengunjungi gudang benih PT. Pertani di Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, (2/3).



Lebih lanjut dikatakan Mentan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca tahun 2013 cenderung baik

dibandingkan tahun sebelumnya, "Meski BMKG memprediksi cuaca yang relatif baik, pemerintah tetap melakukan langkah langkah persiapan dan antisipasi. Seperti untuk masalah tanaman yang mengalami puso, pemerintah sudah menyiapkan bantuan berupa biaya pengolahan sebesar Rp 2,6 juta per hektare, ditambah Rp 1,1 juta untuk pengganti pupuk" jelas Mentan.

Guna mengantisipasi ancaman gagal panen yang disebabkan cuaca buruk sepanjang tahun 2013, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan cadangan benih nasional. Cadangan tersebut akan disalurkan untuk petani yang mengalami puso, dan gagal panen akibat bencana alam yang tidak terduga.

"Untuk padi yang baru ditanam dan kemudian rusak, pemerintah telah menyediakan benih secara gratis. Pemerintah menyiapkan cadangan benih padi nasional sebanyak 25 ribu ton untuk tahun 2013. Cadangan ini akan disalurkan untuk petani yang mengalami gagal panen akibat bencana" jelas Mentan.

Tantangan pertanian lainnya adalah semakin menyempitnya luasan areal tanam, Mentan menganjurkan petani untuk melakukan transmigrasi ke daerah yang lahannya masih luas .

"Problem kita sekarang ini adalah lahan pertanian yang mulai sempit. Rata-rata sekarang ini, seorang petani hanya memiliki 0,2 sampai 0,3 hektare. Untuk mengatasi problem itu, petani bisa transmigrasi ke Kalimantan yang lahannya masih luas " kata Mentan

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kendal Sri Purwati juga menjelaskan, bahwa pada bulan Januari hingga Februari 2013 setidaknya ada 2.000 hektare tanaman padi yang terendam banjir. Namun begitu, pihaknya masih melakukan pendataan untuk kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat, agar petani yang sawahnya terendam air bisa mendapat bantuan benih. "Tanaman padi yang tergenang air itu, usianya sekitar satu minggu hingga satu bulan," kata Kepala Dinas.

Indonesia Penghasil Kakao Terbesar Ke Tiga

Indonesia saat ini merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga setelah Pantai Gading dan Ghana. Total produksi kakao Indonesia setara biji pada tahun 2012 adalah sebesar 833.310 ton, atau meningkat sebesar 17 % dibandingkan produksi tahun 2011 sebesar 712.231 ton. Nilai ekspor kakao dan produk-produk kakao Indonesia pada tahun 2012 mencapai 978 juta US Dollar. Hal tersebut dikatakan Menteri Pertanian Suswono saat membuka Pertemuan ke-87 pertemuan Dewan Kakao Internasional (International Cocoa Organization) di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali (18/3).



International Cocoa International merupakan organisasi kerjasama antara Pemerintah dan Sekretariatnya berkedudukan di London, Inggris. Anggota ICCO terdiri dari negara-negara importir kakao. Dari negara-negara produsen dan negara-negara importir kakao. Dari negara produsen antara lain : Pantai Gading, Ghana, Indonesia, Nigeria, Papua New Guinea, Malaysia, Brazilia dan Equador. Dari negara importir kakao antara lain meliputi Belanda, Inggris, Jerman, Switzerland dan Rusia.

Produktivitas kakao saat ini hanya mencapai 700-800 kilogram per hektar. Padahal, Indonesia memiliki potensial peningkatan produktivitas mencapai 1,5 ton per hektar mengalahkan Pantai Gading yang hanya 1,4 ton per hektar. Pantai Gading sudah tidak dapat meningkatkan produktivitasnya lagi dan ini merupakan kesempatan buat Indonesia untuk menggeser posisi Pantai Gading sebagai negara produsen nomor satu di dunia. Indonesia juga akan terus



kakao, industri diharapkan mulai menggarap produk hilir kakao.

Sementara itu, *Executive Director* ICCO Jean-Marc Anga mengatakan "persoalan yang dihadapi negara-negara produsen adalah masih rendahnya produktivitas tanaman kakao hingga belum bisa memenuhi permintaan. Dilihat dari sisi demand dan supply ada defisit suplai kakao secara global sebanyak 45 ribu ton pada tahun 2012/2013 dan juga proses peremajaan pohon kakao di sejumlah negara.

meningkatkan Gernas kakao untuk meningkatkan produksinya, Kata Mentan.

Lebih lanjut dikatakan Mentan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa strategi untuk pengembangan sektor kakao, strategi ini sejalan dengan hasil dan rekomendasi *World Cocoa Conference* dengan menitik beratkan pengembangan kakao dunia kearah keberlanjutan (*sustainability*) yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Indonesia pada tahun 2016 menargetkan produktivitas sebesar 1,5 ton perhektar, selain itu akan diterapkan bea keluar 5 % untuk biji

Ditambahkan Angga, *Demand* kakao sangat kuat tidak hanya dari pasar tradisional, seperti Eropa dan Amerika, tetapi juga pasar-pasar baru seperti Brasil, Indonesia, Tan Brothers. Peningkatanya konsumsi Kakao dunia salah satunya adalah terutama berkembangnya produk kakao yang membutuhkan konten kakao yang lebih banyak seperti *dark* kakao. Untuk itu, produsen kakao perlu memperhatikan peningkatan permintaan agar mereka berupaya untuk memenuhinya. Perkembangan industri kakao Indonesia positif selama beberapa tahun terakhir ini, oleh karena itu ICCO mendorong negara produsen kakao ditanah air bergabung dengan organisasi agar posisinya lebih kuat.

Audit Importir Terdaftar Sebagai Langkah Investigasi Pemerintah



harga bawang putih, harga bawang merah juga ikut mengalami kenaikan, harga normal Rp13.000 per kg, naik menjadi Rp 40.000 per kg.

Kenaikan harga bawang putih diduga akibat dari kelangkaan barang tersebut di pasaran, importir juga diduga menjadi salah satu penyebab melambungnya harga bawang karena para importir belum memasukkan atau malah justru menahannya dan penyebab lainnya adalah terlambatnya surat rekomendasi impor hortikultura (RIPH) oleh Kementerian Pertanian. Keterlambatan RIPH dapat menyebabkan pasokan bawang putih menjadi langka, karena 90

persen kebutuhan bawang dipasok dari impor.

Saat sekarang harga bawang putih sudah mencapai Rp 43.000-Rp 45.000 per kg, padahal harga normal Rp 12.000 per kg. Di pasar tradisionalpun harga bawang putih sudah mencapai Rp 50.000 per kilogram, sementara di super market Rp 60.000 per kilogram. Selain

"Pasokan bawang putih di berbagai daerah mengalami kelangkaan membuat harga bawang putih mengalami kenaikan sejak Februari 2013. Untuk menstabilkan harga bawang putih, pihak



Kementerian Perdagangan, pekan lalu, telah menerbitkan surat persetujuan impor sebesar 29.130 ton. Sedangkan alokasi impor tersebut berasal dari 16 IT yang telah ditandatangani per 7 Maret 2013,” ujar Menteri Pertanian, Dr. Ir. Suswono, MMA usai membuka seminar *Global Status of Commercialized Biotech/ GM 2012*. (13/3).

Guna mengatasi kelangkaan suplai bawang putih di pasar sehingga memicu kenaikan harga, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan akan melakukan investigasi, dan memanggil semua importir diikuti langkah audit. “Kita akan segera lakukan investigasi, apakah kenaikan harga bawang putih ini karena memang importir menahan pasokan bawang putih, atau karena sebab lain,” kata Mentan.

“Investigasi tersebut memungkinkan pemerintah untuk mendapat informasi akurat, sehingga dapat memastikan pasokan bawang putih aman. Selain itu, juga dapat menekan harga bawang putih. Kalau diperlukan kita akan panggil semua importir dan lakukan audit menyeluruh,” ujar Mentan.

Pengauditan akan dilakukan Pemerintah secara menyeluruh kepada para Importir Terdaftar (IT) bawang putih terkait melonjaknya harga komoditas bawang putih di pasaran. “Pemerintah mengaudit Importir Terdaftar (IT) hortikultura, khususnya komoditas bawang putih sebanyak 114 importir. Kita akan audit secara menyeluruh, apakah mereka benar pelaku IT hortikultura atau hanya pihak-pihak memanfaatkan persetujuan impor tetapi tidak merealisasikan. Bagi IT yang tidak merealisasikan izin impornya maka sanksi terberat adalah di black-list.” ujar Mentan.

Dikhawatirkan, importir yang sudah memiliki izin impor tidak merealisasikan

impornya tetapi menjual izinnya ke orang lain. “Jika di lapangan nanti terbukti ada importir nakal, maka akan kita tinjau ulang dan akan kita berikan sanksi,” tegas Mentan.

Dengan banyaknya importir pada tahun 2013 maka dari jumlah tersebut, Mentan mempertanyakan kelayakan usaha IT tersebut dan dikhawatirkan mereka justru tidak melakukan impor. Mentan melihat kemungkinan adanya tendensi permainan jual-beli surat persetujuan pemasukan impor. “Saya mendapatkan info mereka itu ekspedisi dan bukan importir. Kalau ada indikasi demikian, apakah perusahaan tersebut layak sebagai IT? Untuk masalah persyaratan saya tidak tahu, karena persyaratan izin usaha ada di Kementerian Perdagangan,” jelas Mentan.

Kecurigaan Mentan didasari melonjaknya IT hortikultura yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan tahun 2013 sebesar 128. Padahal



tahun 2012, hanya berjumlah 74 IT. Dalam satu semester tahun 2013, volume impor bawang putih sebesar 160.000 ton, sudah habis diberikan kepada 114 IT. Dengan begitu, tahun 2013 ini, volume IT bawang putih mencapai 320.000 ton.

Jika alokasi impor itu dibagi kepada seluruh importir, maka masing-masing importir hanya akan memiliki kuota atau alokasi impor yang jumlahnya sangat sedikit dan jika para importir sudah memiliki surat rekomendasi, mereka seharusnya bisa memasukkan bawang ke Indonesia.

Mengingat hingga saat sekarang produksi bawang putih Indonesia tidak lebih dari 10 persen, membuat kebutuhan bawang impor sangat mendesak, Kementan menargetkan impor bawang putih pada semester dua

mencapai 320.000 ton, dari total kebutuhan nasional sebesar 400.000 ton. "Per semester kita alokasikan 160.000 ton, jadi di semester kedua ini total mencapai 320.000 ton," kata Mentan.

Impor bawang saat sekarang masih tergolong cukup tinggi, Mentan tetap berharap produksi bawang putih nasional dapat ditingkatkan. Jadi ketergantungan terhadap impor bisa berkurang. "Tingginya impor bawang karena memang produksi kita yang masih kecil, saat ini produksi hanya bisa memenuhi 10% saja. Maka dari itu,

tahun ini juga akan mulai kita bangkitkan lagi sentra produksi bawang putih kita di daerah-daerah sub tropis," ujar Mentan.

Begitu pula dengan harga bawang putih yang saat sekarang sedang tinggi dan menguntungkan petani. Namun Mentan juga mengharapkan harga yang terlampau tinggi tersebut normal lagi. "Insentif harga memang akan mendorong petani bawang putih untuk lebih giat menanam. Namun, mengingat masih besarnya volume impor, maka hal itu hanya akan menguntungkan importir saja," kata Mentan.

Kementan Serahkan Sertifikasi ISPO Kepada Perusahaan Perkebunan Yang Berhak

Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia. Luas lahan baku sawit di Indonesia tercatat 8,9 juta hektare, dengan total produksi tahun 2013 diproyeksikan 23 juta ton.

Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha-usaha pembangunan yang merusak alam dan tidak berwawasan lingkungan," kata Menteri Pertanian, Suswono dalam acara penyerahan sertifikasi ISPO di Kementan (8/3).



Sayangnya, tak semua lahan atau kebun sawit dikelola secara lestari. Akibatnya, banyak tudingan miring dari luar, khususnya Amerika Serikat, soal perkebunan sawit Indonesia. Mulai dari merusak lingkungan, penyumbang emisi gas rumah kaca, hingga pemicu deforestasi. Tak hanya itu, belum lama ini, ada isu ratusan orangutan dibantai dan diusir dari habitatnya karena dianggap merusak kebun sawit. Terkait dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian berusaha meredam tudingan negatif tersebut dengan memberikan sertifikat *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*. "Perekonomian nasional mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk itu bagi bangsa

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia bukan tanpa arah, bukan tanpa rambu-rambu, melainkan sejak awal menganut cakrawala pandang jauh ke depan (visioner) dan taat azas pada semua ketentuan yang berlaku. Sertifikat ISO yang telah diterima merupakan hasil audit dari kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. "Penerapan konsep Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia tidak sebatas kebijakan. bukan sebatas Wacana. Namun dilakukan Audit kepatuhan pelaksanaannya oleh seluruh pelaku Company 's name Perkebunan kelapa sawit" tutur Mentan.

Menteri Pertanian mengingatkan, sertifikasi kebun kelapa sawit "Ramah Pelanggan Customers" akan diwajibkan mulai 2014, Pengusaha kelapa sawit harus memiliki Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemberlakuan ISPO terhadap produk kelapa sawit merupakan komitmen pemerintah Indonesia terhadap lingkungan. "Pada tiga tahun lalu atau tepatnya 17 Maret 2009 berlangsung kegiatan serupa yaitu penyerahan sertifikat RSPO pertama di Indonesia. Dalam

pembangunan perkebunan, penerapan ISPO merupakan kewajiban. Karena itu, penerapannya sangat berbeda dengan dengan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yang bersifat voluntary, Acute RSPO sifatnya untuk memenuhi permintaan Pasar dan bersifat sukarela. Namun untuk ISPO bersifat mandatory dan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pelaku usaha kegiatan pembangunan perkebunan yang berusaha di Indonesia untuk pembuktian bahwa sawit Indonesia ramah lingkungan. Penerapan sertifikat ISPO juga dalam rangka kepatuhan pelaksanaan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia,” tegas Mentan

Menteri Pertanian menegaskan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang tidak melakukan sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sampai 2014 akan dikenai sanksi.

Sertifikasi ISPO merupakan bukti nyata bahwa pengembangan kelapa sawit telah mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. “Pemerintah harus bekerja keras apabila bersikeras memberlakukan sertifikasi tersebut pada 2014. Pasalnya, total luas perkebunan yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO mencapai 200.000 hektare. Sedangkan total luas lahan kelapa sawit bisa mencapai 8,9 juta hektare,” kata Mentan.

Menurut Menteri Pertanian pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mulai dilaksanakan pada awal tahun 80-an melalui pola PIR merupakan hasil kesepakatan berbagai sektor dan fungsi terkait meliputi serangkaian tahapan kegiatan sejak dari tahap persiapan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan pembangunan. “Pola pengembangan perkebunan kelapa sawit didesain dengan

mengintegrasikan aspek-aspek positif dari usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar dalam satu kesatuan sistem produksi melalui mekanisme kerjasama kemitraan. Konsepsinya adalah membuka kesempatan bagi petani agar dapat memiliki aset kebun produktif dalam bingkai kemitraan yang saling menguntungkan, secara berkesinambungan melalui praktek pertanian yang baik atau GAP, telah mengindahkan kaidah-kaidah konservasi yang berarti layak secara lingkungan,”ucap Mentan.

Terbukanya akses petani dalam pengembangan kelapa sawit tersebut, selain menjadi layak secara ekonomi, juga layak secara sosial. Dengan demikian, sejak awal pengembangan kelapa sawit di Indonesia hakekatnya telah menganut tiga pilar prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu layak secara ekonomi, layak secara sosial dan ramah lingkungan. Penyerahan sertifikat ISPO ini merupakan konsistensi sikap dasar bangsa Indonesia bahwa penerapan konsep pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia tidak sebatas kebijakan, tidak sebatas wacana. Namun, dilakukan audit kepatuhan pelaksanaannya oleh seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit,”ujar Mentan.

Pengembangan kelapa sawit telah berperan nyata dalam pemecahan masalah kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan daerah ekspor. Di samping itu kelapa sawit menghasilkan *food, feed, fuel, dan fibre* (pangan, pakan, bahan bakar nabati dan serat) yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dunia dimanapun dan sampai kapanpun. “Saat ini produksi minyak kelapa sawit Indonesia sudah mencapai posisi nomor satu di dunia. Di samping itu pada agribisnis kelapa sawit terkandung potensi yang cukup prospektif seperti hasil samping dan limbah yang mempunyai peluang untuk menghasilkan bio-energi dari biomasa, sumber pakan untuk pengembangan ternak sebagai hasil pupuk organik, dan pengembangan tanaman pangan intensif pada peremajaan dan perluasan tanaman. Selanjutnya pada kegiatan peremajaan kelapa sawit tersedia limbah batang kayu untuk bahan baku perkayuan secara lestari sekitar 40 juta M3 setiap tahun,”jelas Mentan.

Mentan menambahkan, melalui penyerahan sertifikasi ISPO inisial, Maka Kementerian Pertanian mengundang semua pihak terkait





untuk menjadikan momentum inisial sebagai kekuatan tambahan Perjuangan kita Bersama, agar Minyak sawit Indonesia dapat diterima sebagai salah Satu Produk Yang Ramah Pelanggan *Customers*.

Kementerian Pertanian memberikan sertifikat Indonesia *sustainable palm oil (ISPO)* kepada 10 perusahaan perkebunan yang dianggap telah memenuhi persyaratan ISPO sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9/Permentan/OT.140/3/2011. Kesepuluh perusahaan tersebut antara lain PT Musim Mas dengan 2 kebun, PT Sari Aditya Loka 1 kebun, PT Swadaya Andika 1 kebun, PT Laguna Mandiri 1 kebun, PT Ivomas Tunggal 1 kebun, PT Hindoli 1 kebun, PT Gunung Sejahtera Dua Indah 1 kebun, PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi 1 kebun, dan PT Perkebunan Nusantara 1 kebun.

"Hingga saat ini baru ada 100 ribu-200 ribu hektare (ha) lahan sawit yang sudah mendapatkan sertifikat sawit lestari dari total luas lahan 8,6 juta lahan sawit eksisting. Kita bertekad menambah luas lahan yang mendapatkan sertifikat ISPO," kata Menteri Pertanian.

Cukup ironis, dari luas lahan perkebunan sawit yang mencapai 8,9 juta ha, baru 100 ribu-200 ribu ha yang sudah dinyatakan menerapkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit lestari. Dengan adanya penyerahan sertifikat ISPO merupakan momentum kebangkitan industri kelapa sawit Indonesia di tengah kampanye negatif terhadap industri penyumbang devisa nonmigas terbesar tersebut.

Sertifikat ISPO merupakan audit dari kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam penerapan ISPO, perusahaan perkebunan

kelapa sawit harus memenuhi empat kriteria, yakni kepatuhan hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan, dan hubungan sosial.

Selain itu, perusahaan perkebunan sawit harus mengikuti prinsip sistem perizinan dan manajemen perkebunan, penerapan pedoman teknis budi daya dan pengolahan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggungjawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan ekonomi

masyarakat serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Ketujuh prinsip tersebut termuat dalam 27 kriteria dan 117 indikator sesuai peraturan Menteri Pertanian No 19/2011, berupa pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Sementara itu, Dirjen Perkebunan, Ir. Gamal Nasir, MS mengatakan bahwa sertifikasi ISPO sebagai mandatory harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan perkebunan di Indonesia paling lambat 2014 mendatang. Sejauh ini, sertifikat ISPO yang telah diberikan kepada sepuluh kebun kelapa sawit tergolong kecil dimana kesepuluh kebun yang mendapat sertifikat ISPO hanya menaungi luas lahan kelapa sawit sekitar 200 ribu hektare, padahal total luas lahan sawit Indonesia 8,6 juta hektare.

"Kami mengharapkan perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan audit dapat segera mengikuti proses penilaian untuk memperoleh sertifikat ISPO," harap Dirjen Perkebunan..

Menurut Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian akan memberi sanksi terhadap perusahaan yang tidak memiliki ISPO oleh pemerintah. "Salah satu sanksinya, adalah mencabut usaha perkebunannya" ujar Dirjen Perkebunan.

Pemerintah menargetkan 200 kebun kelapa sawit sudah memiliki sertifikat ISPO pada 2013. Saat sekarang sudah diserahkan sertifikat ISPO kepada 10 kebun kelapa sawit dan 15 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit (PKS) sedang melaksanakan proses audit. "Kami mengharapkan perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan audit dapat segera mengikuti proses penilaian," kata Dirjen Perkebunan.

Kementan Tetap Pantau Isu Seputar Persapihan Nasional

Menteri Pertanian Suswono membantah isu adanya pemotongan sapi betina sehingga mengakibatkan populasi sapi di dalam negeri turun drastis dengan ditemukannya sapi jenis impor di pasaran. Yang terjadi justru peningkatan populasi sapi bukan peningkatan pemotongan sapi-sapi betina.

Dari hasil pantauannya, ditegaskan Mentan untuk Pasar Jangkang, volume penjualan sapi meningkat hingga 60 persen. Untuk sapi bakalan dan pejantan potong perhari saja mencapai 150 ekor. Sedangkan untuk kapasitas pasar tersebut mampu menampung hingga 800 ekor sapi.

"Terjadinya peningkatan populasi sapi sekitar 60 persen membuktikan bahwa isu terjadinya peningkatan pemotongan sapi-sapi betina tidak benar, dan di pasar hewan Jangkang dijual khusus sapi bakalan dan pejantan potong. Begitu pula kelangkaan daging sapi tidak benar dan hanya isu saja. Saya sudah meminta agar para pedagang tidak memotong sapi betina produktif agar tidak terjadi kelangkaan daging sehingga apabila daging sapi impor tidak masuk ke pasaran tentu tidak akan berpengaruh terhadap harga di pasaran dalam negeri" kata Mentan saat mengunjungi Pasar Hewan Jangkang di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, (6/3).

Dalam kunjungan tersebut Mentan bersama dengan Bupati Sleman, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman, Kepala Bidang Peternakan dan Camat Ngemplak serta Kades Widodomartani. Kunjungan Mentan ini dimaksudkan untuk memantau harga hewan sapi di pasaran.

Mentan mengaku gembira lantaran harga sapi relatif bagus. "Kami juga ingin memastikan adanya isu bahwa banyak sapi produktif yang dipotong, ternyata tidak benar dan tidak benar ada penurunan populasi sapi," tandas Mentan.

"Saya lihat disini ada indikasi peningkatan yang cukup bagus dalam penjualan sapi. Jadi sangat tidak benar kalau saat ini terjadi kelangkaan daging sapi akibat banyaknya daging sapi impor," kata Mentan

Untuk saat sekarang persediaan stok nasional sudah bisa mengcover kebutuhan nasional

sebesar 85 persen. Ke depan, Kementan juga akan melakukan survei kembali jika terjadi kenaikan harga. "Apa benar karena supply kurang atau memang ada yang memperlmainkan harga," tandas Mentan.

Mentan menilai peternak lokal Indonesia hingga saat sekarang belum bisa menyuplai kebutuhan daging sapi. Sehingga meski populasi sapi naik 60 persen di awal tahun tetapi negara harus tetap impor untuk mengurangi kebutuhan daging sapi.

Lebih lanjut, Mentan menyatakan bahwa impor sapi hanya diperuntukan bagi kebutuhan industri besar semisal hotel dan restoran. Sehingga menurutnya hal itu tidak akan mengganggu terhadap pasaran petani lokal. Mentan juga



menjamin, jika impor memang diperlukan seperti dalam situasi darurat. "Populasi sapi lokal saat ini hanya bisa menyuplai 85 persen kebutuhan daging sapi untuk kebutuhan dalam negeri. Sisanya harus impor, inipun hanya khusus untuk kebutuhan industri seperti hotel-hotel, restoran dan catering. Di Indonesia ada 6,4 juta peternak yang harus kami lindungi, kami tetap berkomitmen akan hal itu" ujar Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Sleman Suwandi Aziz mengatakan harga jual sapi hidup mengalami peningkatan harga sejak tiga bulan terakhir dan ini menggembirakan peternak dan pedagang. "Peningkatan harga jual sapi hidup ini diharapkan harga bisa stabil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan peternak maupun pedagang sapi," kata Kepala Bidang.

Untuk volume penjualan sapi mengalami kenaikan hingga 60 persen dan untuk sapi yang dijual di Pasar Hewan Jangkang sapi bakalan dan pejantan potong perhari rata 150 ekor dan kapasitas pasar hewan sekitar 800 ekor. "Kegiatan pasar ini hanya untuk kebutuhan pasar lokal saja tidak keluar daerah," kata Kepala Bidang.

Nilai transaksi di pasar hewan jangkang, Ngemplak, Kabupaten Sleman tercatat bisa mencapai Rp 900 juta per periode pasar. Paling besar, merupakan transaksi jual beli sapi, kemudian disusul penjualan kambing.



Menurut Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Sleman, nilai transaksi tersebut, diperoleh dari hasil penjualan sapi yang rata-rata terjual sekitar 100 hingga 150 ekor tiap hari pasaran. "Yang lebih besar masih ada, seperti di Pasar Hewan Gamping yang mencapai Rp 2 milyar per pasaran," jelas Kepala Bidang.

Namun, tambahnya, skala kedua pasar hewan ini memang berbeda. Di pasar hewan Jangkang, ketersediaan sapi-sapi itu diprioritaskan untuk

memenuhi kebutuhan lokal. Berbeda dengan di pasar hewan gamping yang memasok pula kebutuhan daging lintas provinsi.

Kepala Bidang menilai, di beberapa sentra penjualan ternak, terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan terutama setelah adanya pembatasan impor sapi di tahun 2013 ini. Hal itulah yang selama ini dikeluhkan oleh para peternak lantaran sangat merugikan usaha mereka.

Bukti Keberhasilan Gerakan Tanam Dengan Jenis Padi Inpari 11 Di Cilacap

Wakil Menteri Pertanian mengapresiasi kinerja para petani di Kabupaten Cilacap, khususnya di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten terkait dengan keberhasilan program Gerakan Tanam Serentak 1000 Hektar di Kawasan tersebut. "Saya sangat berbahagia, karena bisa ikut memanen padi bersama Gubernur dan Bupati. Kita harus jujur mengatakan bahwa Gerakan Tanam Serempak 1.000 Hektar adalah salah satu program penanaman padi yang sangat berhasil," kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan yang didampingi Gubernur Jawa Tengah saat memanen padi hasil Gerakan Tanam Serempak 1.000 Hektar di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Cilacap, Jateng (9/3).

Panen raya padi di desa Bojong merupakan gerakan tanam padi 1000 hektar, dalam rangka mendukung surplus sepuluh juta ton beras nasional di tahun 2014. Gerakan tersebut dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo di Kabupaten Cilacap pada 18 November 2012. Dengan langkah tersebut Jateng memiliki kontribusi dalam pemenuhan target-target produksi pertanian secara nasional.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, angka sementara produksi padi di provinsi Jawa Tengah mencapai 10,233 juta ton atau lebih tinggi 8,95% dibandingkan dengan angka tetap 2011 yang sebesar 9,392 juta ton. "Hingga saat ini Jawa Tengah memiliki kontribusi luar biasa dalam memenuhi target-target produksi pertanian secara nasional. Bahkan produksi padinya paling tinggi karena hampir mendekati 9 persen, padahal nasional hanya 5 persen. Ini konsisten dilakukan dalam



lima tahun terakhir. Saya atas nama Kementerian Pertanian menyampaikan terima kasih kepada Jawa Tengah,” kata Wakil Menteri Pertanian.

Sebagaimana diketahui, pada program Tanam Serentak tersebut, petani di Cilacap mampu memanen padi inpari hingga 10 – 11 ton per hektar. Hasil ini lebih tinggi dari rata – rata panen padi nasional yang hanya sebanyak 5 ton/ hektar. Kabupaten Cilacap juga memiliki lahan paling luas di Jawa Tengah. “Kalau dilihat Kabupaten Cilacap memiliki lahan paling luas di Jawa Tengah yakni sekitar 63.000 hektar lebih. Jadi, kita sayang sekali dengan Cilacap karena turut berkontribusi dalam produksi beras”, kata Wamentan.

Terkait dengan keberhasilan program Gerakan Tanam Serempak 1.000 Hektar, ke depan Kementan akan mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan Cilacap sebagai kawasan percontohan dalam hal manajemen pertanian. “Desa Bojong bersama Kabupaten Grobogan akan dijadikan percontohan manajemen karena modalnya sudah ada, gerakan tanam serentak, panen serentak Nanti akan dikemas dalam manajemen yang sama,” kata Wamentan.

Lebih lanjut Wakil Menteri Pertanian mengatakan, dijadikannya Cilacap sebagai percontohan management farming, karena modalnya sudah ada yakni tanam dan panen raya secara serentak. Dengan penanganan tanam dan panen secara serentak, diharapkan persoalan-persoalan pertanian seperti hama, banjir dan sebagiannya dapat ditangani secara bersama-sama antara kelompok tani dengan para anggotanya.

Dalam dialognya dengan petani, Wamen juga mengungkapkan bahwa masalah air irigasi dan bendungan sudah menjadi perhatian khusus dari Pemerintah pusat, bahkan hingga pada saluran

irigasi primer dan sekunder. “Di negara Philipina untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah tidak membagikan bibit secara gratis, tetapi yang dilakukan adalah memperbaiki semua bendungan yang ada. Dan hasilnya produktifitas pertanian di sana meningkat cukup signifikan” jelas Wamentan.

Oleh karena itu, permasalahan irigasi dan bendungan ini menjadi perhatian yang serius baik oleh pemerintah Pusat, Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Cilacap. Terbukti dengan akan dibangunnya waduk Matenggeng Cilacap pada 2013

Dalam acara yang sama Gubernur Jateng, Bibit Waluyo mengatakan berdasarkan keberhasilan Jateng dalam swasembada beras sebanyak 3.1 juta ton pada akhir tahun 2012, maka dirinya meminta kepada petani di Jateng untuk bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan pangan.

“Jawa Tengah akhir tahun 2012 bisa swasembada beras mencapai 3,1 juta ton, Insya Allah tahun 2013 musim berpihak kepada kita. Padi-padi unggul ini memberikan kontribusi yang luar biasa,” kata Gubernur Jateng.

Menurut Gubernur Jateng panen sekarang merupakan hasil padi yang ditanam olehnya dalam gerakan tanam seribu hektar pada 18 November 2012.

Pihaknya bertekad menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat, melalui modernisasi pertanian termasuk dengan pembibitan yang sesuai dengan jenis tanah.

Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa kawasan Cilacap sangat cocok ditanami padi jenis inpari sehingga hasil padinya maksimal dimana dari hasil ubinan, dalam satu hektar mampu menghasilkan 10 – 11 ton padi. “Ini jenis padi Inpari 11, hasilnya luar biasa. Tanaman padi Inpari ternyata cocok di daerah ini,” kata Gubernur Jateng

Panen serentak 1.000 hektar saat sekarang merupakan hasil penanaman padi dengan menggunakan jenis varietas padi Inpari 11 dan hasilnya ternyata mencapai 10 ton hingga 11 ton gabah kering panen per hektar. Untuk itu Gubernur Jateng menganjurkan kepada petani di Kawunganten agar tetap menanam padi jenis ini. “Kepada para petani di Cilacap mari kita manfaatkan lahan ini dengan sebaik baiknya dengan menanam padi jenis inpari untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga”, kata Gubernur Jateng.



BIRO UMUM DAN HUMAS
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM, No. 3 Jakarta Selatan
Telp./Fax (021) 780 4457 (ext.2316)